

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan lingkungan hidup akhir-akhir ini sudah semakin ramai dibicarakan. Pembangunan yang bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya sudah tentu tidak lepas dari tujuan agar kehidupan manusia itu terdapat keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Baik itu kehidupan di antara sesamanya maupun dengan lingkungan alam. Tetapi cita-cita mulia yakni dambaan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang itu tidak mudah diwujudkan mengingat masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pentingnya lingkungan hidup tersebut. Masalah lingkungan telah menjadi perhatian internasional, bahkan kepopulerannya sering disejajarkan dengan masalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi (Amu, 2014: hal. 1).

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Pada sampah itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam antara lain, sampah kemasan yang berbahaya atau sulit diurai oleh proses alam. Penanganan dan pengendalian akan menjadi semakin kompleks dan rumit dengan semakin kompleksnya jenis maupun komposisi dari sampah sejalan dengan semakin majunya kebudayaan (Hermawati, 2015: hal. 2).

Kondisi ini memaksa pemerintah daerah memacu kemampuan untuk mengelola sampah dengan baik dan benar berdasarkan pengetahuan yang relative minim. Namun sayang, niat baik pemerintah itu masih jauh dari memadai bila diukur dari sistem dan metode pengelolaan sampah yang efektif, aman, sehat, ramah lingkungan, dan ekonomis. Sehingga penanganannya pun dipahami hanya sebatas urusan memindahkan, membuang, dan memusnahkan dengan cara yang sangat tidak aman dan cenderung mencemari lingkungan (Hermawati, 2015: hal. 8).

Pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan akan menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan (Kustiah, 2005: hal. 1). Lebih jauh lagi, penanganan sampah yang tidak komprehensif akan memicu terjadinya masalah sosial, seperti amuk massa, bentrok antar warga, pemblokiran fasilitas TPA (Hadi, 2004: hal. 20).

Saat ini hampir seluruh pengelolaan sampah berakhir di TPA sehingga menyebabkan beban TPA menjadi sangat berat, selain diperlukan lahan yang cukup luas, juga diperlukan fasilitas perlindungan lingkungan yang sangat mahal. Semakin banyaknya jumlah sampah yang dibuang ke TPA salah satunya disebabkan belum dilakukannya upaya pengurangan volume sampah secara sungguh-sungguh sejak dari sumber (Kustiah, 2005: hal.3).

Peran serta masyarakat sangat penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Masyarakat perlu diperlakukan sebagaimana manusia

yang memiliki potensi dan mampu untuk berkembang. Hakikat mendasar dari kemandirian adalah keyakinan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk mengorganisasi dirinya sendiri (Amu, 2014: hal. 52).

Warga Kabupaten Cirebon diminta jangan membuang sampah di beberapa tempat pembuangan sampah (TPS) yang berada di perbatasan Kota dan Kabupaten Cirebon. Permintaan ini disampaikan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Cirebon setelah pihak Kabupaten Cirebon mempertanyakan soal retribusi sampah yang diambil oleh DKP setelah kontrak kerja sama tidak diperpanjang sejak Maret 2015 lalu.

Menurut Kepala DKP Kota Cirebon, Taufan Barata menyebutkan, sebenarnya wajar kalau pihaknya masih memungut retribusi kepada warga Kabupaten Cirebon, sebab warga Kabupaten Cirebon di wilayah perbatasan membuang sampah ke TPS yang merupakan milik Pemerintah Kota Cirebon. Bahkan 200 meter kubik dari total 600 meter kubik sampah per harinya yang dibuang ke TPA Kopi Luhur merupakan sampah yang berasal dari warga Kabupaten Cirebon.

Beberapa TPS milik pemkot yang menjadi tempat pembuangan sampah warga Kabupaten Cirebon diantaranya TPS di Jalan By Pass yang terletak di dekat tugu ucapan selamat datang, TPS di Jalan Galunggung, TPS di Sukalila, TPS di Taman Krucuk, serta TPS di dekat kompleks Pilang Setrayasa. Khusus untuk TPS di dekat kompleks Pilang Setrayasa sebenarnya belum resmi dibuka, namun warga Kabupaten Cirebon sudah menggunakan TPS ini sebagai tempat pembuangan sampah (dikutip dari:

<http://www.kabar-cirebon.com/read/2015/11/pelayanan-sampah-warga-kabupatendipertanyakan/>).

Persoalan sampah di Kabupaten Cirebon belum juga usai. Setelah sampah-sampah menumpuk di tempat pembuangan sampah sementara di wilayah Barat gara-gara TPA Gunung Santri ditutup, kini sampah di wilayah tengah yang menumpuk. Salah satunya TPS di Desa Pilang Sari, Kecamatan Kedawung. Penumpukan sampah sudah terjadi sejak satu bulan terakhir, dan membuat banyak warga sekitar mengeluhkan persoalan ini, sebab TPS yang berada di pinggir jalan membuat sampah meluber hingga ke jalan serta menimbulkan bau yang tidak sedap. Tak hanya gara-gara TPA Gunung Santri ditutup yang membuat sampah banyak menumpuk di TPS Desa Pilang Sari ini, namun juga disebabkan oleh rusaknya truk untuk memuat sampah tersebut. Kerusakan truk ini terjadi sebulan yang lalu.

Kondisi ini diperparah dengan rusaknya truk pengangkut sampah. Sementara, warga tidak menghentikan aktivitasnya untuk membuang sampah di TPS ini. Dengan lokasi TPS yang berada di pinggir jalan, membuat TPS ini akhirnya menjadi sasaran tempat pembuangan warga di luar Desa Pilang Sari. Sekitar 15 gerobak sampah pun tidak berhenti membuang sampah ke TPS ini setiap harinya.

Dua TPA di wilayah timur yaitu Ciledug dan Ciawijapura sudah kelebihan kapasitas karena TPA Gunung Santri yang sudah ditutup untuk kegiatan membuang sampah. Tadinya, TPA Ciledug tidak begitu aktif, namun akhirnya diaktifkan kembali saat TPA Gunung Santri sepi aktivitas.

Total dalam sehari di TPA Gunung Santri terdapat 400 meter kubik sampah yang akhirnya dibagi ke dalam dua TPA di wilayah timur tersebut (dikutip dari: <http://www.kabar-cirebon.com/read/2016/06/sampah-menumpuk-di-pilang-sari/>).

Persoalan sampah di Kabupaten Cirebon sepertinya tidak akan pernah tuntas. Selain kurang kesadaran dari warga, instansi terkait juga belum punya strategi jelas untuk memperbaikinya. Yang parah lagi, tumpukan sampah itu berada di Jalan Raya Pilang Kedawung, yang merupakan jalan nasional. Sebagian jalur nasional sudah tertutup akibat luberan sampah rumah tangga yang sudah menggunung di TPS Jalan Raya Pilang Kedawung. Meski demikian, warga tetap saja melakukan pembuangan sampah di TPS tersebut.

Warga Desa Pilang, Ian menuturkan, tumpukan sampah di Jalan Raya Pilang Kedawung setiap hari memang dalam keadaan penuh dan menggunung. Sepengetahuannya setiap hari memang ada *dumpruck* pengangkut sampah. Hanya saja tidak semua sampah diangkut. Pengangkutan sampah sepertinya dipilih-pilih (dikutip dari website yang beralamatkan : <http://www.radarcirebon.com/lewat-jalan-pilang-wah-penuh-sampah.html>).

Setiap harinya volume sampah di Kabupaten Cirebon yang masuk ke tiga Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) tak kurang dari 475 meter kubik per hari. Belum lagi adanya sampah liar yang belum terangkut. Jika sampah-sampah di Kabupaten Cirebon semuanya terangkut, maka volume sampah bisa mencapai lebih dari 1.000 meter kubik per hari, kata Kepala

Bidang Kebersihan DCKTR Kabupaten Cirebon Dedi Sudarman, belum lama ini.

Sampai saat ini di Kabupaten Cirebon baru 27 kecamatan yang terlayani dalam pengangkutan sampah. Sisanya masih belum terlayani, karena memang diakui sarana yang dimiliki masih belum maksimal. Masyarakat Kabupaten Cirebon belum sepenuhnya memiliki kesadaran yang tinggi dalam menangani permasalahan sampah. Dari 27 kecamatan belum semua Desa dilayani, sebab sarana prasarana masih kurang. DCKTR Kabupaten Cirebon punya 28 kendaraan terdiri dari 10 amrol dan sisanya dumtruk. Standar pelayanan DCKTR Kabupaten Cirebon minimal 40 kendaraan jadi minus 12 kendaraan. Dan perlu pengadaan alat berat lagi.

Dalam menangani sampah yang ada Dedi pun mengharapkan peran aktif pihak Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Cirebon untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada masyarakat agar kesadaran mereka terkait sampah bisa terbangun. Selama ini kendalanya masyarakat masih belum sadar akan permasalahan sampah padahal sangat berdampak buruk jika dibiarkan tidak diangkat (dikutip dari: <http://news.fajarnews.com/read/2016/01/27/8511/volume.sampah.di.kab.cirebon.capai.1.000.meter.kubik.per.hari>).

Pemerintah Kabupaten Cirebon dituntut lebih maksimal mengatasi persoalan sampah di masyarakat tingkat Desa. Persoalan yang jelas terlihat di masyarakat adalah tidak adanya tempat pembuangan sampah sementara di tingkat Desa. Hal ini mengakibatkan penumpukan sampah di Desa.

A Aflahah warga Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, menganjurkan agar Pemerintah Kabupaten Cirebon segera membuat peraturan daerah (perda) mengenai kebijakan pengelolaan sampah khususnya di tingkat Desa. Ini bukan masalah sadar atau tidak sadar, tapi bagaimana pemerintah bisa menyediakan dan memfasilitasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pemerintah Kabupaten Cirebon beserta kuwu bisa sama-sama bersinergi untuk dapat menciptakan perda dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini pemkab dan kuwu mau tidak mau di setiap Desanya mesti menyediakan lahan guna pembangunan TPS. Jika tiap Desa mau menghibahkan tanah bengkoknya untuk dibuatkan TPS, maka Kabupaten Cirebon akan bersih dan indah. Hingga masyarakat akan sadar tidak lagi membuang sampah sembarangan.

Kuwu Panembahan Kecamatan Plered H Abdul Qodir mengaku dengan gagasan dibuatnya perda sampah di tingkat Desa tersebut setuju saja, sepanjang tidak menjadi beban baru bagi mereka sebagai pemerintah Desa. Terkait dengan hibah tanah bengkok untuk pengadaan TPS, Abdul Qodir mengaku keberatan dan tidak setuju. Pasalnya keuangan Desa yang berasal dari ADD maupun dana Desa belum maksimal. Sehingga kemungkinan besar Desa tidak bisa membangun TPS tanpa didukung dari Pemkab Cirebon.

Sementara Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cirebon Dedi Sudarman SH menjelaskan, Kabupaten Cirebon baru memiliki 200 TPS. Di Kabupaten Cirebon sudah ada perda nomor 7 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Hanya saja perda tersebut nampaknya belum maksimal melihat

masyarakat yang masih minim untuk membayar retribusi sampah. Dedi mencontohkan pihaknya telah memberikan bantuan boks kontainer pembuangan sampah, namun warga selalu mengira bahwa pembuangan sampah ke boks kontainer tersebut gratis. Padahal ada biaya retribusi sebesar Rp 3.000 perbulan. Menurut Dedi karena masyarakat tidak mau bayar akhirnya berhentilah program boks kontainer TPS itu. DCKTR Kabupaten Cirebon ini tiap tahunnya ditargetkan harus memperoleh PAD sebesar Rp 2,1 miliar.

Sementara itu anggota komisi I DPRD Kabupaten Cirebon H A Aidin Tamim menuturkan, dibentuknya pembuatan perda adalah persoalan mudah. Namun yang perlu di garis bawahi ialah sejauh mana implementasi dari pada perda tersebut. Menurut Aidin mengenai soal perda gampang tinggal dibuat saja, tapi yang terpenting itu jangan sampai perda yang sudah dibuat hasilnya nol besar (dikutip dari: <http://www.radarcirebon.com/persoalan-sampah-harus-ada-tps-di-tingkat-desa.html>).

Kondisi sampah yang setiap hari volumenya cukup tinggi, ke depan akan dibangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional di dua titik dengan mengharapkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dedi pun menargetkan 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon bisa terlayani pengangkutan sampahnya di tahun sekarang. Menurut Dedi kemungkinan di Suranenggala sama Ciwaringin rencana pembangunan TPA-nya, luasnya minimal 10-12 hektare. Masih pembahasan di provinsi serta masih menunggu dari provinsi dan ke depan DCKTR Kabupaten Cirebon juga akan ke Bandung lagi untuk mengetahui sejauh

mana pembahasan TPA regional ini (dikutip dari: <http://www.kabar-cirebon.com/read/2016/01/volume-sampah-di-kabupaten-cirebon-tinggi/>).

Berdasarkan penelusuran data akan permasalahan terkait pengelolaan sampah oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang di Kabupaten Cirebon maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “**Analisis Pengelolaan Sampah di Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2016**”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana konsep pengelolaan sampah di perbatasan Kabupaten Cirebon tepatnya di Jalan Raya Pilang Sari Kecamatan Kedawung oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dari Tahun 2014-2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian (*research question*) yang muncul dengan latar belakang seperti yang diuraikan di atas. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh gambaran strategi yang digunakan oleh DCKTR Kabupaten Cirebon dalam pengelolaan sampah di Jalan Raya Pilang Sari Kecamatan Kedawung yang ada di perbatasan Kabupaten Cirebon.
2. Untuk menginventarisasi problematika yang dihadapi DCKTR Kabupaten Cirebon dalam pengelolaan sampah di Jalan Raya Pilang Sari Kecamatan Kedawung yang ada di perbatasan Kabupaten Cirebon.

3. Untuk memberikan rekomendasi bagi DCKTR Kabupaten Cirebon dalam menyempurnakan pengelolaan sampah di Jalan Raya Pilang Sari Kecamatan Kedawung yang ada di perbatasan Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan di bidang Ilmu Pemerintahan khususnya.
2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan nantinya menjadi salah satu referensi bagi pengembangan ide mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan dalam melakukan penelitian dengan tema atau masalah yang serupa.
3. Secara praktis
 - a. Memberikan pengetahuan bagi Pemerintah Daerah bagaimana cara mengelola sampah dengan baik dan benar.
 - b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang ada di sekitarnya.

E. Kerangka Teori

1.1 Pengertian Manajemen Pengelolaan Sampah

Menurut UU No. 18 Tahun 2008 pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis menyeluruh dengan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Adapun usaha pengelolaan sampah menurut Slamet, baik skala besar maupun skala kecil apabila sudah tercapai tujuannya, yakni lingkungan dan masyarakat yang sehat, maka faktor utama yang harus diperhatikan yaitu peran dan masyarakat harus mengerti dan mau berpartisipasi.

Menurut Poewadarminta (1991), pengelolaan adalah penyelenggaraan atau tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang (perusahaan) dalam melakukan sesuatu, sehingga diperoleh manfaat dari pengelolaan tersebut (Poerwadarminta, 1991: hal. 11).

Departemen Kesehatan dalam buku Pedoman Pembuangan Sampah, manajemen sampah didefinisikan sebagai suatu bidang yang berhubungan dengan pengaturan terhadap penumbuhan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pemrosesan dan pembuangan sampah (Departemen Kesehatan. 1987: hal. 20).

Riyadi (1986) mengatakan bahwa pengelolaan sampah yang baik jika sampah tidak menjadi tempat berkembang biaknya bibit penyakit (Riyadi, 1986: hal. 67).

Manajemen pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Menurut Kartikawan, pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transportasi, pengolahan dan pembuangan akhir sebagai berikut (Kartikawan, 2007: hal. 40).

Menurut Soekidjo sampah ialah suatu bahan atau benda pada yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia atau benda-benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang (Notoatmojo, 2007: hal. 35).

Sedangkan Riyadi (1986) menilai bahwa sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan hanya sebagian dari benda atau hal-hal yang

dipandang tidak dapat digunakan lagi, tidak dipakai, tidak disenangi, atau harus dibuang sedemikian rupa sehingga tidak sampai mengganggu kelangsungan hidup. (Riyadi, 1986: hal. 34).

Menurut Suprihatin (1999) sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis (Suprihatin, 1999: hal. 28).

Jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, sampah institusi/kantor/sekolah, dan sebagainya (Alex, 2011: hal. 1).

1. Berdasarkan jenisnya sampah dibagi menjadi :

a. Sampah Organik

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat *biodegradable*. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung, sayuran, kulit buah, daun dan ranting.

b. Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan

menjadi : sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca, sampah keramik, dan sampah detergent. Sebagian besar sampah anorganik tidak dapat diurai oleh alam/mikroorganisme secara keseluruhan (*unbiodegradable*). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng (Gelbert dkk, 1996).

2. Berdasarkan sumbernya sampah dibagi menjadi :

- a. Sampah Alam, sampah yang diproduksi dikehidupan liar diintegrasikan melalui proses daur ulang alami, seperti daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Di luar kehidupan liar, sampah-sampah ini dapat menjadi masalah, masalah daun-daun kering di lingkungan pemukiman.
- b. Sampah Manusia, sampah manusia adalah istilah yang biasa digunakan terhadap hasil dari pencernaan manusia seperti *feses* dan *urin*. Sampah manusia dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai vektor (sarana perkembangan) penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. Salah satu perkembangan pada dialektika manusia adalah pengurangan penularan penyakit melalui sampah manusia dengan cara hidup yang higienis dan sanitasi. Termasuk di dalamnya adalah perkembangan penyaluran pipa (*plumbing*).

- c. Sampah Rumah Tangga, sampah rumah tangga merupakan sampah yang dihasilkan dari kegiatan di dalam rumah tangga, sampah yang dihasilkan oleh kebanyakan rumah tangga adalah kertas dan plastik.
- d. Sampah Konsumsi, sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh (manusia) pengguna barang, dengan kata lain adalah sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah. Ini adalah sampah yang umum dipikirkan manusia.
- e. Sampah Perkantoran, sampah yang berasal dari lingkungan perkantoran dan pusat perbelanjaan, sebagian besar sampah yang dihasilkan adalah sampah organik, kertas, tekstil, plastik dan logam.
- f. Sampah Daerah Industri, sampah industri dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sampah umum dan limbah berbahaya cair atau padat.
- g. Sampah Nuklir, sampah nuklir merupakan hasil dari fusi nuklir dan fisi nuklir yang menghasilkan *uranium* dan *thorium* yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan juga manusia. Oleh karena itu sampah nuklir disimpan ditempat-tempat yang tidak berpotensi tinggi untuk melakukan aktivitas, tempat-tempat yang dituju biasanya bekas tambang garam atau dasar laut (walau jarang namun kadang masih dilakukan).

3. Berdasarkan bentuknya sampah dibagi menjadi :

a. Sampah Padat

Sampah/Limbah padat adalah semua sampah atau timbunan dari aktifitas buangan manusia dan binatang yang normalnya padat atau barang-barang buangan yang tidak bermanfaat yang sudah tidak diinginkan (George, dkk, 1993).

b. Sampah cair

Sampah cair adalah limbah cair merupakan sisa buangan hasil suatu proses yang sudah tidak dipergunakan lagi, baik berupa sisa industri, rumah tangga, peternakan, pertanian, dan sebagainya. Komponen utama limbah cair adalah air (99%) sedangkan komponen lainnya bahan padat yang bergantung asal buangan tersebut (Rustama et. al, 1998).

c. Sampah dalam bentuk gas

Sampah dalam bentuk gas adalah semua limbah yang berbentuk gas atau berada dalam fase gas, contoh : karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO₂), nitrogen oksida (Nox), dan sulfur oksida (Sox) (Alex, 2011: hal. 5-13).

A. PENGELOLAAN SAMPAH MENURUT DEPARTEMEN KESEHATAN



Gambar 1.1
Diagram Pengelolaan Sampah .
Sumber : Tehobanoglous, 1997:21 dan SNI 19-2454-2002)

1. Timbulan Sampah (solid waste generated)

Sampah tidak diproduksi tetapi ditimbulkan (*solid waste is generated, not produced*) sehingga metode penanganannya harus tepat, penentuan skala timbulan sampah dipengaruhi oleh jumlah pelaku, jenis serta kegiatannya. Satuan volume sampah dinyatakan dalam m³/hari atau satuan berat sampah dinyatakan dengan ton/hari (Kusumaningrum, 2005: hal. 18). Informasi dan data timbulan sampah dapat digunakan untuk :

- a. Penentu jenis alat angkut.
- b. Pertimbangan kekuatan badan jalan yang dilalui alat angkut.
- c. Desain kapasitas unit pengelolaan dan dimensi tempat pembuangan.

2. Penyimpanan dan Pengumpulan Sampah (refuse storage and refuse collecting)

Azrul berpendapat penyimpanan sampah yaitu tempat sampah sementara sebelum sampah itu dikumpulkan kemudian diangkat dan dibuang. Penyimpanan sampah sebaiknya disediakan tempat yang berbeda sesuai jenis sampah, misal pemisahan untuk sampah organik dan sampah non organik.

Syarat tempat penyimpanan sampah yang digunakan :

- a. Memiliki konstruksi kuat dan tahan bocor.
- b. Memiliki tutup sehingga mencegah bau yang ditimbulkan dan menghindari lalat (Azwan, 1990: hal. 53).

Kegiatan pengumpulan sampah sementara dari sumbernya menuju lokasi Tempat Pembuangan Sementara atau penyimpanan sampah sementara. Dalam tahap ini sampah ditampung sementara pada tingkat rumah tangga sehingga berhubungan langsung dengan masyarakat sekitar.

Departemen Kesehatan menyebut sangat penting bagi setiap rumah tangga menempatkan wadah sampahnya dengan plastik (Departemen Kesehatan, 1987: hal. 45). Umumnya ditempatkan dalam gerobak dari rumah-rumah menuju TPS. Ukuran ideal untuk TPS ialah 300-500 meter. Pengumpulan sampah menurut Departemen Kesehatan paling banyak memakan biaya yaitu kurang lebih 80% dari semua dana pengelolaan. Adapun anjuran untuk pengumpulan sampah dapat dilakukan satu minggu dua kali untuk menghindari perkembangan lalat dan tikus.

Azrul berpendapat penyimpanan sampah yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan sampah dari tempat penyimpanan sampah sebelum diangkut dan dibuang.

Syarat tempat pengumpulan sampah adalah :

- a. Dibangun di atas permukaan setinggi kendaraan pengangkut sampah.
- b. Terdapat lubang ventilasi tertutup kawat kasa guna mencegah masuknya lalat.
- c. Tidak menjadi sarang lalat dan tikus.
- d. Tempat tersebut mudah dicapai, baik oleh masyarakat pemakai maupun oleh kendaraan pengangkut sampah (Azwar, 1990: hal. 58).

3. Pengangkutan dan Alat Transportasi (*transfer and transport*)

Kegiatan memindahkan sampah dari tempat pembuangan sementara menuju lokasi pembuangan pengolahan sampah atau tempat pembuangan akhir. Departemen Kesehatan menyebutkan ada dua langkah dalam kegiatan pengangkutan sampah yaitu:

- a. Pemindahan dari alat angkut yang lebih kecil ke alat angkut yang lebih besar.
- b. Transport selanjutnya pada jarak yang jauh ke tempat pembuangan akhir.

Alat transportasi sampah yang digunakan untuk mengangkut sampah dari sumber maupun dari tempat pembuangan sementara (TPS) ke (TPA) adalah:

1. Gerobak/becak sampah.
2. Dump Truck.
3. Truk pembawa container (*handle container system's*) (Kusumaningrum, 2005: hal. 28).

Pemindahan ini dilakukan di tempat pemindahan (*transfer station*). Jenis alat angkut yang digunakan harus disesuaikan dengan kondisi jalan yang ada di daerah tersebut. Kemampuan jalan untuk menerima beban harus disesuaikan dengan alat angkut yang akan dipakai. Hal tersebut diikuti dengan pertimbangan terhadap personil, rute, biaya operasional serta perawatan. Letak TPA juga sebaiknya tidak terlalu jauh dengan sumber sampah karena akan berpengaruh terhadap biaya transport. Jarak ideal tidak lebih dari 20 km, jika lebih dari 20 km harus menggunakan transfer station yang cenderung mahal.

Sistem pengangkutan sampah dapat dilakukan dengan pengangkutan langsung dari tempat pengumpulan ke pembuangan akhir atau dari tempat penyimpanan ditampung terlebih dahulu ke tempat pengumpulan sementara (*transfer station*) lalu diangkut dengan kendaraan yang lebih besar ke tempat pembuangan akhir (Prabowo, 2003: hal. 39).

4. Pengolahan (treatment)

Dalam pembuangan sampah ada beberapa metode yang digunakan dalam pemrosesan sampah. Adapun tujuan pengelolaan sampah dengan melakukan pemrosesan adalah untuk mengurangi volume, merubah bentuk dan menggunakan kembali menjadi bahan yang bermanfaat.

Beberapa metode menurut Departemen Kesehatan secara umum terbagi menjadi tujuh, yaitu :

- a. Menggiling. Dengan cara menggiling atau menghancurkan dengan alat (*grinder*) maka sampah yang mudah membusuk dihancurlumatkan dan dibuang bersama dengan air limbah ke saluran pembuangan limbah.
- b. Menyortir. Tempat di mana sampah dipisah-pisahkan mengingat bahwa yang terdapat dalam sampah ada yang masih berguna.
- c. Pemadatan. Tujuannya adalah untuk mengurangi volume dengan menggepengkan sampah sehingga dapat meminimalisir ruangan.
- d. Mengiris-iris dan menghancurkan sampah dengan air (*hydropulpery*). Setelah sampah diiris-iris lalu dilumatkan menggunakan air dalam mesin penghancur setelah itu dipisahkan kembali dan dipadatkan.
- e. Membuat kompos. Selain mengurangi volume sampah dengan cara ini dapat menghasilkan kompos yang dapat dipergunakan sebagai pupuk.
- f. Pembakaran. Pembakaran di sini bukan pembakaran disembarang tempat melainkan membakar sampah di tempat pembakaran yang disebut *incinerator*. Dimaksudkan untuk mengurangi volume dan merubah bentuk fisik dari sampah.

Sampah diolah tergantung dari jenis dan komposisi. Adapun beberapa cara dalam pengolahan sampah yaitu:

1. Transformasi fisik, yaitu pemisahan komponen sampah (*shorting*) dan pemadatan (*compacting*) hal ini dilakukan untuk mempermudah penyimpanan dan pengangkutan. Untuk mendapatkan bahan-bahan besi menggunakan magnet dan menggunakan “*ireem*” untuk mendapatkan gelas.
2. Pembakaran (*incinerate*), yaitu teknik pengolahan sampah yang dapat mengubah sampah menjadi gas, sehingga volume berkurang hingga $\pm 90\%$. Teknik ini berpotensi menimbulkan pencemaran udara.
3. Pembuatan kompos (*composting*), kompos yaitu pupuk alami yang terbuat dari bahan hijauan dan bahan organik lain untuk proses pembusukan, misal kotoran ternak.
4. *Energy recovery*, yaitu transformasi sampah menjadi energi, baik energy panas maupun listrik. Cara ini banyak dilakukan di negara maju pada instalasi besar dengan kapasitas ± 300 ton/hari dengan pembangkit listrik sehingga energy listrik ± 96.000 MHW/tahun.

Ada konsep utama untuk pengolahan sampah ialah mengubah paradigma pengelolaan sampah dari kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan disumber (*reduce at source*) dan daur ulang sumber daya (*resources recycle*).

Adapun konsep tersebut lebih kita kenal dengan menggunakan metode 3R: *Reduce, Reuse and Recycle*, yaitu:

1. *Reuse* (Guna Ulang) yaitu kegiatan penggunaan kembali sampah yang masih digunakan baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain.

2. *Reduce* (Mengurangi) yaitu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah.
3. *Recycle* (Mendaur ulang) yaitu mengolah sampah menjadi produk baru.

5. Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA)

Pembuangan akhir sampah adalah tahap di mana sampah dari kendaraan atau tempat pembuangan sementara dibawa dan dibuang di suatu tempat yang telah ditentukan. Dalam usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara, akan tetapi cara pembuangan sampah yang lazim dilakukan saat ini adalah sebagai berikut:

1. *Open Dumping*, yaitu membuang sampah secara terbuka di atas permukaan tanah tanpa perencanaan maupun tanpa memperhatikan kesehatan masyarakat sekitar dan kesehatan lingkungan.
2. *Dumping In Water*, yaitu pembuangan sampah di mana sampah itu dibuang begitu saja di air yaitu sungai dan laut.
3. *Burning On Premise*, yaitu pembuangan di mana sampah basah diadakan pemecahan melalui proses pemasakan sehingga diperoleh bahan makanan ternak maupun sebagai bahan penyubur tanah.
4. *Grinding System*, merupakan pembuangan sampah basah yang berasal dari sisa makanan dengan menghancurkan terlebih dahulu kemudian dibuang ke lokasi pembuangan untuk mengalami pembusukan.
5. *Composting*, merupakan pemecahan bahan organik dari sampah biokimia yang memproduksi hasil akhir yang menyerupai humus.

6. *Incineration*, merupakan pembuangan sampah yang digunakan dengan cara pembakaran (Departemen Kesehatan, 1987 hal: 80).

Pembuangan akhir sampah harus memenuhi syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan. Untuk mengurangi dampak tersebut maka ada beberapa persyaratan yang mutlak dipenuhi dalam pelaksanaannya untuk mengurangi dampak yang bisa ditimbulkan, menurut Departemen Kesehatan persyaratan tersebut antara lain :

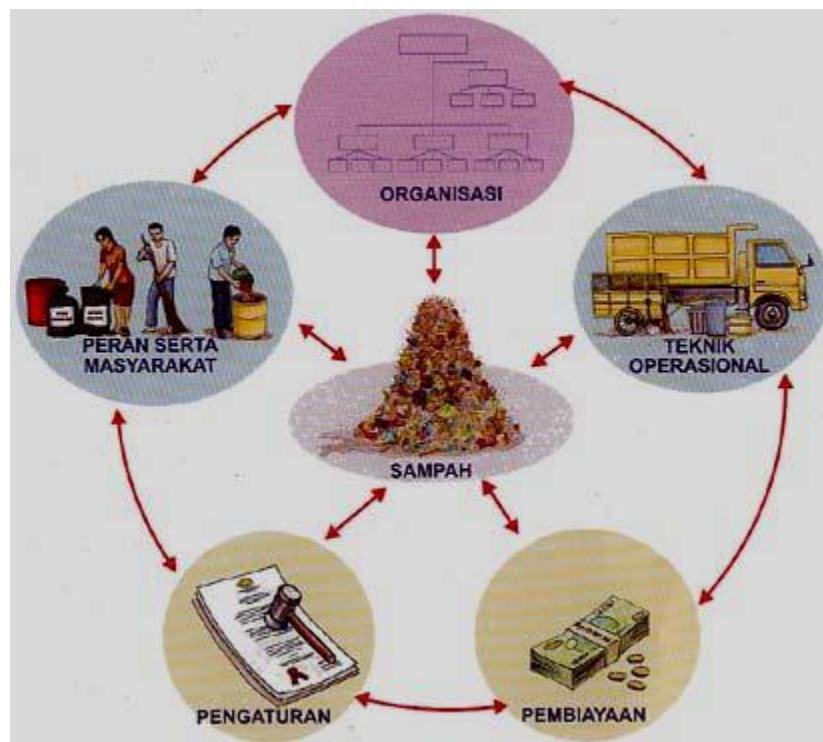
1. *Open dumping* harus dilakukan jauh dari tempat kediaman.
2. Di luar jarak terbang lalat.
3. Tidak terlampau dekat dengan jalan besar (Departemen Kesehatan, 1987: hal. 83).

Azrul berpendapat pembuangan sampah dilakukan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang bisanya ditempatkan di daerah tertentu sehingga tidak mengganggu kesehatan manusia. Adapun syarat tempat pembuangan akhir sampah adalah:

1. TPA dibangun tidak dekat dengan sumber air bersih.
2. Tidak dibangun pada daerah yang sering terkena banjir.
3. Terletak jauh dari pemukiman penduduk.
4. Diupayakan jalan menuju TPA dibuat jalur sendiri.
5. TPA sebaiknya dialokasikan mengarah ke hilir, tetapi tidak terlalu dekat dengan pantai untuk menghindari pencemaran perairan di mana jarak minimal ke pantai adalah 10 km (Azwar, 1990: hal. 45).

B. ASPEK-ASPEK PENGELOLAAN SAMPAH MENURUT DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

Sistem pengelolaan sampah adalah proses pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek/komponen yang saling mendukung di mana antara satu dengan yang lainnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan (Dept. Pekerjaan Umum, SNI 19-2454-2002). Kelima aspek tersebut meliputi: aspek teknis operasional, aspek kelembagaan, aspek peraturan, aspek pembiayaan dan aspek peran serta masyarakat.

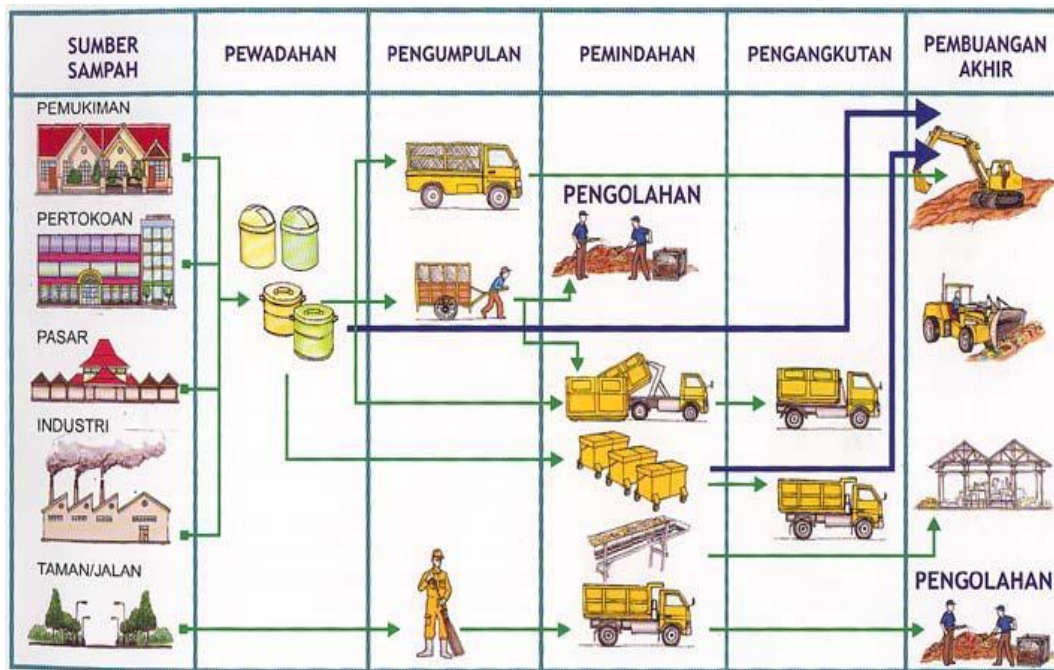


Gambar 1.2
Skema Manajemen Pengelolaan Sampah
(Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, (SNI 19-2454-2002))

1. Aspek Teknik Operasional

Aspek Teknis Operasional merupakan komponen yang paling dekat dengan obyek persampahan. Menurut Hartoyo (1998: hal. 6), perencanaan sistem persampahan memerlukan suatu pola standar spesifikasi sebagai

landasan yang jelas. Spesifikasi yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 19-2454-2002 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman. Teknik operasional pengelolaan sampah bersifat integral dan terpadu secara berantai dengan urutan yang berkesinambungan yaitu: penampungan/pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan.



Gambar 1.3
Teknis Operasional Pengelolaan Sampah
(Sumber: Standar Nasional Indonesia (SNI 19-2454-2002))

Aspek Teknik Operasional merupakan salah satu upaya dalam mengontrol pertumbuhan sampah, namun pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan pertimbangan kesehatan, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan (Tchobanoglous, 1997: hal. 363).

a. Penampungan sampah

Proses awal dalam penanganan sampah terkait langsung dengan sumber sampah adalah penampungan. Penampungan sampah adalah suatu

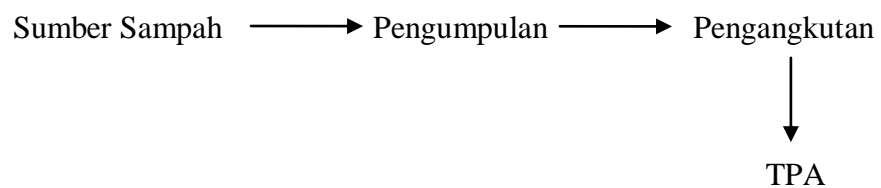
cara penampungan sampah sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke TPA. Tujuannya adalah menghindari agar sampah tidak berserakan sehingga tidak mengganggu lingkungan. Faktor yang paling mempengaruhi efektifitas tingkat pelayanan adalah kapasitas peralatan, pola penampungan, jenis dan sifat bahan dan lokasi penempatan (SNI 19-2454-2002).

b. Pengumpulan sampah

Pengumpulan sampah adalah cara proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan sampah sampai ke tempat pembuangan sementara. Pola pengumpulan sampah pada dasarnya dikempokkan dalam 2 (dua) yaitu pola individual dan pola komunal (SNI 19-2454-2002) sebagai berikut :

1. Pola Individual

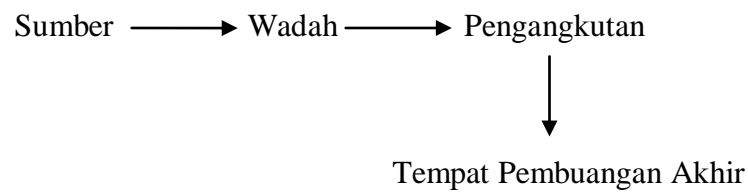
Proses pengumpulan sampah dimulai dari sumber sampah kemudian diangkut ke tempat pembuangan sementara/ TPS sebelum dibuang ke TPA.



Gambar 1.4
Pola Pengumpulan Sampah Individual Tak Langsung
Sumber: SNI 19-2454-2002

2. Pola Komunal

Pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil sampah ke tempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan / ke truk sampah yang menangani titik pengumpulan kemudian diangkut ke TPA tanpa proses pemindahan.



Gambar 1.5
Pola Pengumpulan Sampah Komunal
Sumber: SNI 19-2454-2002

c. Pemindahan sampah

Pemindahan sampah merupakan proses memindahkan dari tempat pengumpulan ke tempat pemrosesan akhir. Pada umumnya pemindahan sampah di kota besar dilakukan oleh petugas kebersihan dengan menggunakan peralatan mekanik maupun manual atau kombinasi keduanya.

d. Pengangkutan

Pengangkutan sampah pada umumnya menggunakan alat pengangkut. Di daerah pemukiman, pengangkutan sampah umumnya menggunakan gerobak atau truk kecil. Untuk pengangkutan ke TPA pada umumnya menggunakan truk besar sesuai dengan volume sampah yang harus diangkut. Peralatan pengangkutan sampah di kota besar antara lain: truk, *dump* truk, *compactor* truk, *multi loader*, *crane*, dan mobil penyapu jalan.

e. Pembuangan akhir sampah

Pembuangan akhir merupakan tempat yang disediakan untuk membuang sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah lebih lanjut. Prinsip pembuangan akhir sampah adalah memusnahkan sampah domestik di suatu lokasi pembuangan akhir. Jadi tempat pembuangan akhir merupakan tempat pengolahan sampah.

2. Aspek Kelembagaan

Organisasi dan manajemen mempunyai peran pokok dalam menggerakkan, mengaktifkan dan mengarahkan sistem pengelolaan sampah dengan ruang lingkup bentuk institusi, pola organisasi personalia serta manajemen. Institusi dalam sistem pengelolaan sampah memegang peranan yang sangat penting meliputi: struktur organisasi, fungsi, tanggung jawab dan wewenang serta koordinasi baik vertikal maupun horizontal dari badan pengelola (Widyatmoko dan Moerdjoko, 2002: hal. 29).

Jumlah personil pengelola persampahan harus cukup memadai sesuai dengan lingkup tugasnya. Untuk sistem pengumpulan jumlah personil minimal 1 orang per 1.000 penduduk yang dilayani sedangkan sistem pengangkutan, sistem pembuangan akhir dan staf minimal 1 orang per 1.000 penduduk.

3. Aspek Pembiayaan

Aspek pembiayaan berfungsi untuk membiayai operasional pengelolaan sampah yang dimulai dari sumber sampah/penyapuan, pengumpulan, transfer dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan

akhir. Selama ini dalam pengelolaan sampah perkotaan memerlukan subsidi yang cukup besar, kemudian diharapkan sistem pengelolaan sampah ini dapat memenuhi kebutuhan dana sendiri dari retribusi (Dit. Jend. Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, Dep.Kimpraswil, 2003).

Menurut SNI – T-12-1991-03 tentang Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, biaya pengelolaan sampah dihitung berdasarkan biaya operasional dan pemeliharaan serta pergantian peralatan. Perbandingan biaya pengelolaan dari biaya total pengelolaan sampah sebagai berikut :

- a. biaya pengumpulan 20 % - 40 %.
- b. biaya pengangkutan 40 % - 60 %.
- c. biaya pembuangan akhir 10% - 30 %.

Biaya pengelolaan persampahan diusahakan diperoleh dari masyarakat (80%) dan Pemerintah Daerah (20%) yang digunakan untuk pelayanan umum antara lain: penyapuan jalan, pembersihan saluran dan tempat-tempat umum. Sedangkan dana pengelolaan persampahan suatu kota besarnya disyaratkan minimal ± 10 % dari APBD. Besarnya retribusi sampah didasarkan pada biaya operasional pengelolaan sampah (Dit. Jendral Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, Dep.Kimpraswil, 2003). Di Indonesia, besar retribusi yang dapat ditarik dari masyarakat setiap rumah tangga besarnya $\pm 0,5$ % dan maksimum 1 % dari penghasilan per rumah tangga per bulan (Dit. Jendral Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, Dep.Kimpraswil, 2003: hal. 67).

4. Aspek Peraturan/Hukum

Prinsip aspek peraturan pengelolaan persampahan berupa peraturan-peraturan daerah yang merupakan dasar hukum pengelolaan persampahan yang meliputi (Hartoyo, 1998: hal. 8) :

- a. Perda yang dikaitkan dengan ketentuan umum pengelolaan kebersihan.
- b. Perda mengenai bentuk institusi formal pengelolaan kebersihan.
- c. Perda yang khusus menentukan struktur tarif dan tarif dasar pengelolaan kebersihan.

Peraturan-peraturan tersebut melibatkan wewenang dan tanggung jawab pengelola kebersihan serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pembayaran retribusi.

5. Aspek Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat sangat mendukung program pengelolaan sampah suatu wilayah. Peran serta masyarakat dalam bidang persampahan adalah proses dimana orang sebagai konsumen sekaligus produsen pelayanan persampahan dan sebagai warga mempengaruhi kualitas dan kelancaran prasarana yang tersedia untuk mereka. Peran serta masyarakat penting karena peran serta merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, masyarakat lebih mempercayai proyek/program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan (LP3B Buleleng-Clean Up Bali, 2003: hal. 40). Dalam aspek peran serta masyarakat dapat dilihat dari :

- a. Rutinitas pembayaran retribusi sampah.
- b. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kerja bakti.

- c. Penyediaan tempat sampah pribadi.

1.2 Pengertian Otonomi Daerah

Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian didalam UU Nomor 32 tahun 2004 yang dimaksudkan hak-hak bagi daerah otonom adalah daerah memiliki hak, antara lain :

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
- b. Memilih pimpinan daerah.
- c. Mengelola aparatur daerah.
- d. Mengelola kekayaan daerah.
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun beberapa pendapat para ahli tentang definisi otonomi daerah, antara lain :

Atang Syarifuddin “Otonomi daerah mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan melainkan kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan”.

Syarif Saleh “Hak mengatur dan memerintah daerah sendiri di mana hak tersebut merupakan hak yang diperbolehkan dari pemerintah pusat”.

Kemudian dalam penjelasan tentang definisi otonomi daerah, ada juga pendapat yang mengartikan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (syafiie, hal. 64).

Dengan adanya definisi tentang otonomi daerah, mengartikan bahwa daerah dapat leluasa dalam mengatur daerahnya sendiri guna untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat maupun mengelola sumber daya yang dimiliki. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usah-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu :

- a. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon

Kabupaten Cirebon meliputi Luas 990,36 km dengan jumlah penduduk 2.143.545 Jiwa yang terdiri dari 40 Wilayah Kecamatan, 412 Desa dan 12 Kelurahan. Seiring dengan perkembangan organisasi

pemerintahan baik yang ada di daerah maupun di pusat, mengalami perubahan-perubahan. Ini berimplikasi terhadap bidang keciptakaryaan yang ditangani oleh beberapa instansi pemerintah, tetapi dengan diterbitkan Surat Keputusan Bupati Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Suatu Lembaga/Badan/Dinas atau Kantor, Tugas Pokok Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menjadi jelas. Peraturan Bupati Cirebon No. 56 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah landasan dasar hukum yang kuat untuk dilaksanakan yaitu: “membantu bupati dalam hal melaksanakan tugas kewenangan dibidang keciptakaryaan”.

Sedangkan Fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah :

1. Pengelolaan urusan ketata usaha dinas.
2. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan di bidang keciptakaryaan.
3. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengembangan dan pengendalian tata ruang dan bangunan.
4. Pelaksanaan kegiatan penataan permukiman dan penyehatan lingkungan.
5. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebersihan dan persampahan, pertamanan dan permakaman.
6. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran.
7. Pelayanan umum di bidang keciptakaryaan.
8. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis di bidang keciptakaryaan.
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan kewenangannya (dikutip dari: <http://dcktr.cirebonkab.go.id/tupoksi>).

Dari sumber berita online yang penulis dapatkan terkait realisasi tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dalam pengelolaan sampah belum begitu optimal dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana kemudian alat-alat yang digunakan dalam pengelolaan sampah kurang memadai juga tidak didukungnya oleh kesadaran dari masyarakat itu sendiri serta minimnya biaya operasional untuk pengelolaan sampah dan minimnya lahan untuk tempat pembuangan sampah sehingga dalam proses pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon bisa dikatakan belum optimal.

Dengan berlakunya otonomi daerah ini membawa dampak adanya perluasan tugas-tugas keciptakaryaan salah satunya adalah dalam pengelolaan sampah. Sebagai salah satu Dinas di Pemerintah Kabupaten Cirebon, seharusnya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bertanggung jawab untuk membantu kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di bidang keciptakaryaan. Dalam rangka menunjang pelaku pembangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang harus mampu meningkatkan kualitas produk unggulan daerah termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusia. Oleh karena itu keterbatasan investasi pemerintah, kurangnya keterlibatan swasta, dan in-efisiensi penggunaan dana pembangunan dalam menuju kesuksesan pelaksanaannya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menyusun Visi nya yang menunjukkan jati diri fungsi dengan merumuskan Visi sebagai berikut: **“Terwujudnya Tata Ruang serta Permukiman yang Teratur, Indah, Bersih dan Aman dari Bahaya Kebakaran”**.

Dalam konteks tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, menjadi pelopor pembangunan yang berwawasan lingkungan ini dapat diterangkan pada diwujudkannya good governance melalui peningkatan pelayanan keciptakaryaan oleh segenap jajaran aparat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (dikutip dari: <http://dcktr.cirebonkab.go.id/visi-dan-misi>).

F. Definisi Konseptual

Konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 1989: hal. 33). Maka penulis mengemukakan definisi konseptual yaitu :

1. Manajemen Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan buangan dari sisa-sisa aktivitas yang tidak lagi dibutuhkan atau dipakai.
2. Otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat dan peraturan perundang-undangan.

G. Definisi Operasional

Indikator Pengelolaan Sampah :

1. Aspek operasional merupakan salah satu upaya dalam mengontrol pertumbuhan sampah. Dapat diukur dengan :
 - a. Penampungan/pewadahan sampah
 - b. Pengumpulan sampah
 - c. Pемindahan sampah

- d. Pengangkutan sampah
 - e. Pengolahan sampah
2. Aspek kelembagaan adalah organisasi yang menggerakkan, mengaktifkan dan mengarahkan sistem pengelolaan sampah dengan ruang lingkup bentuk institusi. Dapat diukur dengan :
- a. Struktur organisasi
 - b. Fungsi organisasi
 - c. Tanggung jawab organisasi
3. Aspek peraturan adalah pengelolaan persampahan berupa peraturan-peraturan daerah yang merupakan dasar hukum pengelolaan persampahan yang meliputi:
- a. Perda yang dikaitkan dengan ketentuan umum pengelolaan kebersihan
 - b. Perda mengenai bentuk institusi formal pengelolaan kebersihan
 - c. Perda yang khusus menentukan struktur tarif dasar pengelolaan kebersihan
4. Aspek pembiayaan berfungsi untuk membiayai operasional pengelolaan sampah. Dapat diukur dengan :
- a. Pembiayaan SDM pengelola sampah
 - b. Pembiayaan operasional pengelolaan sampah
5. Aspek peran serta masyarakat dalam bidang persampahan adalah proses dimana orang sebagai konsumen sekaligus produsen pelayanan persampahan. Dapat diukur dengan :
- a. Rutinitas pembayaran retribusi sampah

- b. Keikutsertaan dalam kegiatan kerja bakti
- c. Penyediaan tempat sampah

H. Metode Penelitian

1. Jenis Kualitatif

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, variable dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya, serta menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan situasi yang terjadi, sikap dan pandangan yang menggejala di masyarakat, hubungan antara variable, pertentangan dua kondisi atau lebih, pengaruh terhadap kondisi, perbedaan antar fakta dan lain-lain.

Metode ini juga memungkinkan pendekatan yang lebih luwes, tidak terlalu rinci, tidak lazim mendefinisikan suatu konsep, serta memberi kemungkinan bagi perubahan-perubahan manakala ditemukan fakta yang lebih mendasar, menarik, unik dan bermakna di lapangan (Aziz dalam Bungin, 2003:39). Dengan demikian, penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan fenomena pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon.

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian atau inkuiri naturalistik atau alamiah, etnografi, interaksionis simbolik, perspektif ke dalam etnometodologi. Untuk mengadakan pengkajian selanjutnya terhadap istilah penelitian kualitatif

perlu kiranya dikemukakan beberapa definisi. Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan “metode kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2001: hal.3).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon, karena instansi ini mempunyai peran penting dalam terciptanya pengelolaan sampah yang komprehensif dan terpadu yang ada di Kabupaten Cirebon.

3. Unit Analisis Data

Sumber data atau sumber informasi dalam penelitian ini meliputi :

- a. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon.
- b. Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.
- c. Balai Desa Pilang Sari.
- d. Petugas Kebersihan di TPS Pilang Sari.
- e. Masyarakat di Jalan Raya Pilang Sari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.

4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

A. Data Primer

Data yang langsung berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini data primernya adalah masalah yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah oleh DCKTR Kabupaten Cirebon. Data

primer didapatkan melalui wawancara kepada narasumber sesuai dengan indikator-indikator pada definisi operasional yang telah dijelaskan di atas.

Tabel 1.1
Data primer

No.	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Konsep pengelolaan sampah	DCKTR Kabupaten Cirebon	Wawancara
2.	Hambatan dalam pengelolaan sampah	DCKTR Kabupaten Cirebon	Wawancara

B. Data Sekunder

Data yang didapat dari kajian sumber yang digunakan sebagai penunjang dalam analisa masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Tabel 1.2
Data Sekunder

No.	Nama Data	Sumber Data
1.	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012	DCKTR
2.	Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2008	DCKTR
3.	Instruksi Bupati Nomor 7 Tahun 2016	DCKTR

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kedua jenis data tersebut, yaitu data primer dan data sekunder, karena kedua data tersebut saling melengkapi satu sama lain dan sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

A. Observasi

Observasi adalah pencatatan dan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek penelitian untuk memerlukan data-data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian (Salim, 2006: hal.14). Dengan melihat beberapa objek penelitian seperti : kondisi objek di lapangan yaitu ke salah satu TPS di Jalan Pilang Sari Kecamatan Kedawung dan TPA di Ciledug serta ingin melihat langsung saat para pekerja melakukan pengangkutan sampah, pendaur ulangan sampah dan proses pemantauan.

Observasi dilakukan sebanyak dua kali untuk memantau secara langsung keadaan TPS di Jalan Pilang Sari Kecamatan Kedawung dan satu kali untuk memantau keadaan TPA di Ciledug. Tujuan melakukan observasi langsung ke tempatnya adalah agar penulis mengetahui keadaan lingkungan di sekitarnya, sarana prasarana, juga melihat langsung saat para pekerja melakukan pengangkutan dan pendaur ulangan sampah. Sehingga data yang akan penulis teliti menjadi lebih akurat karena sesuai dengan fakta yang ada dan memudahkan penulis dalam menganalisis.

B. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data-data yang mendukung penelitian dan dapat diperoleh menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan memakai dokumen sebagai sumber data yang diperoleh seperti laporan-laporan,

catatan dan dokumentasi yang diperoleh dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon (Salim, 2006: hal. 15).

C. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlanjut kepada tujuan penelitian. Dengan penelitian ini penyusun melakukan tanya jawab secara lisan atau tatap muka. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan ataupun pendapat dari responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan kerangka dan tujuan penelitian (Salim, 2006: hal.16). Pada tahapan wawancara obyek yang menjadi sasaran wawancara adalah DCKTR Kabupaten Cirebon.

Tabel 1.3
Daftar Narasumber yang akan diwawancarai

No	Narasumber
1.	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon
2.	Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon
3.	Balai Desa Pilang Sari
4.	Petugas kebersihan di TPS Pilang Sari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon
5.	Masyarakat di Jalan Raya Pilang Sari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon

6. Alasan Pemilihan Lokasi

Mengingat pentingnya menjaga dan memelihara kebersihan dan terciptanya lingkungan yang sehat di Kabupaten Cirebon yang belum terkelola dengan baik. Dengan dilandasi tanggung jawab dan semangat otonomi daerah, tentunya dituntut kemandirian terutama dalam pengelolaan sampah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

7. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa data studi kasus dan monografis, mudah diklasifikasikan dan jumlahnya sedikit. Dengan menggunakan teknik analisis data yang didapat di dalam penelitian lapangan tidak lagi dianalisis dengan menggunakan rumus-rumus angka-angka tetapi data yang diperoleh tersebut diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian.

Secara umum, kegiatan analisis data meliputi rangkaian kegiatan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan informasi di lapangan yang bersifat primer atau sekunder, bersifat kualitatif.
- b. Memeriksa data yang telah diperoleh di lapangan.
- c. Menyusun klasifikasi informasi di dalam data yang diperoleh.
- d. Mendeskripsikan sekaligus menganalisa dan dan menginterpretasikan.
- e. Mengambil kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penelitian terbagi ke dalam empat bab yakni sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, definisi konseptual, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang deskripsi umum lokasi penelitian yang meliputi; Profil Kabupaten Cirebon, Profil Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon, selain itu juga berisi penjelasan umum Profil Kecamatan Kedawung.

BAB III : ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2016

Bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan hasil penelitian mengenai gambaran umum sistem pengelolaan sampah di Jalan Raya Pilang Sari Kabupaten Cirebon tahun 2014-2016, faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya, dan deskripsi responden.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang akan penulis kemukakan dalam skripsi ini.